Partai-Partai Islam Bangkit, Mau Apa?

Gelombang reformasi yang melanda negeri kita saat ini ternyata bukan hanya membawa hal-hal yang kian menakutkan: harga-harga naik, kerusuhan merebak dimana-mana, dan tindak kekerasan banyak bermunculan. Tapi, juga berkah bagi umat Islam yang ingin terjun ke dunia politik. Bagaimana tidak, ratusan partai kini berdiri, dan belasan di antaranya adalah partai yang berasaskan Islam, bukan Pancasila. Sesuatu yang di masa Orde Baru, ditabukan, kini jadi lumrah: asas Pancasila diganti dengan asas Islam, tanda gambar yang dulunya Bintang, kini diganti jadi Ka'bah, seperti yang dilakukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun, tantangan yang menghadang bagi kemunculan partai-partai Islam itu yang terkesan *dadakan* itu adalah bagaimana membangun visi politik dan kebangsaan yang tidak lagi mengulangi pola-pola aliran, seperti di tahun 1950-an. Tapi lebih pada peningkatan kualitas politik umat Islam, misalnya demokrasi, HAM, plu-ralisme dan penghargaan terhadap hak-hak sipil dan politik rakyat.

Namun, yang kita lihat justru dominannya pola-pola penggunaan agama untuk menggalang massa dan juga untuk merebut kekuasaan. Sejumlah partai menggunakan asas Islam demi memperkuat atau mempertahankan jumlah pemilih yang fanatik, seperti PPP dan Partai Keadilan; konstituen beberapa partai juga tetap tidak berubah dari pola-pola ikatan lama yang bersifat primordial, apakah itu berdasar agama, kelompok atau etnik, seperti PKB, PAN, atau PBB. Apalagi bila kita melihat agenda-agenda mereka yang tidak menonjolkan ide-ide kebangsaan, demokrasi atau HAM.

Persoalan yang muncul kemudian: apakah partai-partai Islam itu sudah siap berdemokrasi dan mengedepankan prinsip-prinsip yang bersifat kebangsaan dan pluralisme? Apakah mereka tidak akan saling menjatuhkan atas nama kelompok berdasar perbedaan agama, ras dan etnik? Apakah mereka sudah meninggalkan doktrin-doktrin politik lama yang berorientasi konservatif? Apakah mereka bisa menghargai perbedaan dan tidak lagi menggunakan agama sebagai instrumen untuk merebut dan memper-tahankan kekuasaan, seperti yang kita lihat dalam kasus Pam Swakarsa atau dalam Kongres Umat Islam Indonesia yang ditujukan untuk mempertahankan *status quo* dalam Sidang Istimewa MPR November 1998 lalu?

Dalam rubrik **POLEMIK** edisi ini, Pengasuh Ponpes Al-Hidayah, Purwokerto, Jawa Tengah **KH. Dr. Nur Iskandar al-Barsani** dan Rektor IAIN Jakarta **Dr. Azyumardi Azra** akan memberikan tanggapan dan komentarnya tentang fenomena kebangkitan partai-partai Islam di Tanah Air belakangan ini:

■ **KH. Dr. Nur Iskandar al-Barsani,** Pengasuh Ponpes Al-Hidayah, Purwokerto, Jawa Tengah

Langkah Mundur, Menggunakan Asas Sektarian

Bagaimana Anda membaca fenomena kebangkitan partai-partai Islam seperti sekarang ini?

Sebenarnya, yang disebut sebagai partai Islam masih mengandung tanda tanya. Persoalannya, sejauh mana manfaat asas Islam sebagaimana yang tercantum dalam asas parta-partai Islam itu? Kalau lebih merusak tali persatuan, lebih baik Islam dijadikan ciri, bukan asas. Sebab kalau menggunakan asas Islam di negara yang pluralistik seperti ini, saya khawatir akan justru kehancuran yang terjadi. Karena itu Nabi Muhammad dalam melaksanakan politik Islam, mengatur Madinah yang masyarakatnya sangat plural, tidak menggunakan asas Islam, tapi menggunakan konstitusi yang disebut Piagam Madinah. Tetapi tentu saja dijiwai oleh ajaran Islam. Karena ajaran Islam sendiri sudah mencakup ajaran tentang pentingnya persatuan dalam negara yang majemuk atau pluralistik.

Nah, negara kita pluralistik, maka kalau kita menggunakan asas sektarian berarti itu sebuah langkah mundur. Berkalikali saya mengatakan bahwa untuk melakukan reformasi tidak harus dengan merubah bangunan yang berupa negara kesatuan RI ini. Tetapi cukup membersihkan atau melakukan pembaharuan di dalam hal-hal yang mendasar yang ada di negara kesatuan RI ini, misalnya hubungan antara lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif, soal Dwifungsi ABRI, dan hal-hal mendasar lainnya. Maka dengan gagasan negara federal, saya kira akan muncul negara-negara bagian yang sektarian. Kecuali berapa puluh tahun lagi, kalau negara kita sudah siap seperti negara maju. Bangsa kita ini belum siap untuk menjadi negara federal yang cenderung membuka peluang sektarian. Sehingga barangkali ada negara bagian yang asasnya Islam, Katolik, Kristen, Budha, Hindu.

Negara federal bukan berarti jelek. Tapi belum waktunya untuk diterapkan di negara kita. Kalau dilihat dari mudlarat dan manfaatnya, gagasan negara federal harus sebatas wacana dan jangan memaksakan kehendak kepada golongan lain. Sekarang, partai-partai Islam muncul kembali, karena reformasi diartikan secara berlebihan. Artinya, masalah yang

mendasar dalam kehidupan berbangsa pun berusaha direformasi. Sebenarnya Pancasila diharapkan menjadi platform bersama dan berfungsi sebagai perekat pluralisme.

Bila Anda mengatakan bahwa antara asas dan ciri terdapat perbedaan, lalu apa sebenarnya perbedaan yang fundamental itu?

Ciri itu menyangkut program, strategi, sedangkan asas adalah landasan pokok. Landasan pokok itu harus sama, tapi masing-masing mempunyai ciri yang tercerminkan dalam program, dan strategi.

Pada masa Orde Baru, de-aliranisasi dan de-ideologi tampaknya berhasil. Tetapi, setelah Orde ini runtuh, ternyata aliranisasi dan ideologisasi kembali marak. Menurut Anda?

Dalam hal ini, kesalahan Orde Baru adalah cara yang ia tempuh sangat berlebihan. Berlebihan di dalam membela Pancasila, dalam waktu yang sama mempersempit ruang keagamaan. Pengajian dipersulit, penataran P4 dibiayai secara besar-besaran. Sehingga, deideologisasi dan dealiranisasi tidak berlangsung secara wajar tetapi dipaksakan. Akibatnya, Pancasila oleh beberapa kalangan tidak diang-gap sebagai payung yang menaungi semua, tetapi diperhadapkan dengan Islam. Maka sulit bagi mereka untuk menyebut negara kita sebagai negara Islam. Karena ternyata negara tidak memajukan agama dengan alasan Pancasila. Itu kesalahan Orde Baru.

Menurut Anda sendiri, apa motif munculnya partai-partai Islam di berbagai kelompok Islam itu?

Ada sebagian yang ingin mendirikan negara Islam. Indikasi ke arah ini sangat kuat. Saya pernah mendengar langsung dari kelompok tertentu yang menyatakan bahwa yang tidak dapat diubah hanya al-Quran. UUD dan Pancasila bisa diubah. Menurut saya, itu jelas arahnya ingin mendirikan negara Islam. Apakah yang penting label "negara Islam", apakah *Islamic society*-nya, itu persoalannya. Jika pilihannya adalah *Islamic society*, labelnya tidak menjadi persoalan. Dan yang terpenting adalah masyarakatnya terbina secara Islami serta leluasa menjalankan syariat Islam. Menurut wacana Islam Sunni, sebagaimana pandangan al-Mawardi, negara semacam itu sudah negara Islam.

Sejak awal tahun 80-an di kalangan para aktivis gerakan Islam tampak ada perubahan dari orientasi ideologis dengan muara akhir negara Islam kepada yang lebih berorientasi peningkatan kualitas ummat. Menurut Anda sejauhmana perubahan itu?

Begini, secara sederhana, paradigma Islam ada dua. Ada yang filosofis dan ada yang tekstualis. Biasanya yang menghendaki negara Islam berparadigma tektualis, sedang yang filosofis tidak, karena label itu tidak penting. Gerakan-gerakan Islam tekstualis dan pada umumnya radikal lebih mementingkan label dari pada substansi, sehingga berdasarkan pendekatan yang *harfiah* itu seringkali memusyrikkan orang. Menerima Pancasila dianggap musyrik misalnya. Sedangkan kalangan NU tidak demikian. NU sendiri mendekati persoalan itu bukan dari teksnya, tapi dari filosofi atau substansinya.

Misalnya, soal sanksi pencurian: menurut pendekatan *harfiah* harus potong tangan. Tetapi persoalannya, apa bisa dilaksanakan di negara kita. Maka kita dekati persoalan ini dengan lebih substansial. Substansi dari sangsi potong tangan adalah agar pencuri menjadi jera sehingga mencegah terjadinya pencurian. Jadi bisa dengan bentuk lain selain potong tangan. Saya kira pendekatan yang substansial semacam ini belum banyak dikembangkan.

Mengapa gerakan pengalihan orientasi gerakan Islam yang dilakukan oleh Gus Dur, Nurcholish Madjid dan sebagainya belum tersosialisasi di kalangan umat Islam?

Sebabnya, pemahaman tentang Islam belum teraktualisasi. Mereka belajar Islam tapi tidak mengerti paradigmanya, melainkan hanya menerima. Maka yang meningkat adalah simbolisme Islam tapi hakekat Islam belum beranjak jauh. Misalnya, orang mulai rajin berjama'ah di mana-mana. Tetapi perilaku politik dan ekonominya masih belum sesuai dengan ajaran Islam. Islam masih dipahami dengan arti yang sempit, hanya terbatas pada *ibadah mahdlah*. Meskipun itu sudah baik. Bahwa Islam juga mengatur negara,

mengatur ekonomi, belum dipahami.

Jadi, menurut saya, gagalnya gerakan ini karena pemahaman Islam di negara kita masih sempit. Maka perlu reaktualisasi ajaran Islam, terutama pada paradigmanya.

Selain tujuan-tujuan ideologis, yakni berdirinya negara Islam, yang ingin dicapai oleh partai-partai Islam apa?

Selain terdapat target-target politik kekuasaan, ba-rangkali mereka juga be-rangkat dari motif keyakinan keagamaan. Karena pendekatan mereka adalah tekstualis, maka berdirinya negara Islam diyakini sebagai kewajiban agama. Selama orang tidak bisa memahami pendekatan yang substantif, maka sulit pula memahami kenyataan keragaman dan arti pluralisme. Sehingga berat menerima kenyataan bahwa negara kita adalah pluralistik yang dengan demikian tidak harus mengedepankan label Islam, tapi Islam dalam arti substantif, supaya betul-betul melindungi semua warga negara. Namun per-soalan-nya, sampai kiamat dua pendekatan *harfiah* dan non-*harfiah* ini sulit untuk mencapai kata sepakat. Oleh karena itu akan terjadi pergumulan terus-me-nerus.

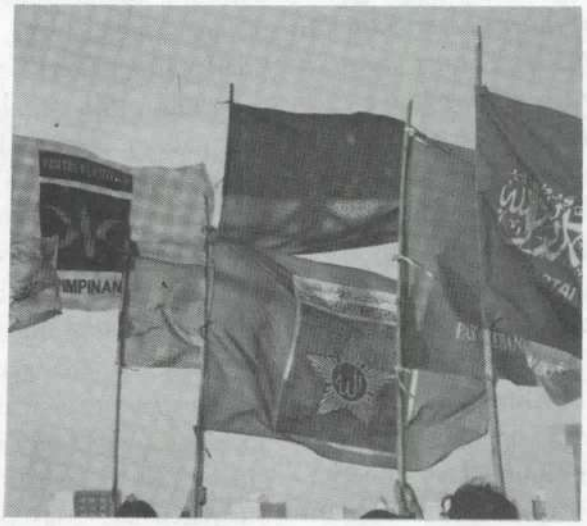

Beberapa bendera partai-partai Islam

Di samping kecenderungan mengede-pankan label Islam, tampaknya ada juga yang mengemukakan orientasi lain seperti keadilan, kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan demok-ratisasi. Yang lebih dominan yang mana?

Saya rasa, ini merupakan persoalan lama yang muncul kembali, yakni pergumulan antara kelompok Masyumi dan kelompok yang di luar Masyumi. Untuk mengukur mana yang lebih dominan, mungkin sulit dalam arti angka, tapi dalam arti pengamalan saya yakin lebih banyak yang berpendekatan substantif. Karena, di samping masyarakat pesantren, orang Islam nasionalis juga lebih cenderung ke Islam substantif. Mereka tidak peduli dengan label tapi yang penting penghayatan dan pengamalan. Tetapi umumnya kelompok tekstual memang militan. Meskipun angkanya kecil tetapi keberadaan mereka tidak bisa diabaikan.

Di kalangan Masyumi sendiri ada dua generasi yang mungkin sudah berbeda paradigmanya. Selain para aktifis tua, ada generasi muda yang punya paradigma lain seperti yang dicontoh-kan oleh generasi Cak Nur. Apakah kecenderungan generasi muda berpengaruh pada kalangan tua Masyumi?

Saya kira perubahan ini karena faktor pendidikan. Pendidikan itulah yang membuat mereka semakin bisa berfikir secara filosofis. Saya kira di kalangan mereka yang banyak berkembang sekarang justru yang filosofis. Karena pendekatan filosofis menggunakan penalaran. Semakin maju peradaban dan pendidikan seseorang, semakin filosofis cara berfikirnya.

Oleh karena itu, bersama kemajuan pendidikan aktifis di masing-masing golongan saya kira akan semakin kritis dan tidak bisa menerima ajaran begitu saja. Kecenderungan tersebut terus menerus mempertanyakan penafsiran keagamaan, karena intelektual yang membaik adalah yang mengembang-kan kerangka berfikir filosofis. Dengan demikian, banyak dari generasi muda kalangan Masyumi yang berpikirnya dekat dengan NU, seperti Nurcholish Madjid, Emha Ainun Najib, Muslim Abdurrahman dan sebagainya. Pada umumnya generasi muda Masyumi berpikirnya paralel dengan NU.

Sejauh pengamatan Anda sendiri, apakah partai-partai Islam itu sudah memiliki platform politik

yang jelas?

Menurut saya belum. Karena yang selalu menjadi rujukan mereka adalah negara-negara Islam. Sementara negara-negara tersebut juga gagal menerapkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Perdebatan seputar apakah Islam sebagai bentuk negara atau Islam sebagai jiwa negara belum pernah tuntas. Polemik ini sulit untuk diselesaikan. Tapi menurut saya apalah artinya label negara Islam jika perilakunya tidak seperti yang dikehendaki Islam. Apakah perilaku Syi'ah di Iran itu sesuai dengan ajaran Islam sepe-nuhnya, apakah di Arab Saudi juga begitu? Nggak. Apakah Pakistan juga begitu? Masih penuh tanda tanya semua.

NU sendiri bagaimana? Apakah platform politiknya sudah jelas?

Platform politik di NU adalah negara kesatuan, dan kerangka berfikirnya melindungi yang lain, *rahmatan lil'alamin*. Kebetulan Ahlussunnah wal jamaah (Aswaja) memiliki implikasi *rahmatan lil alamin*. Tidak ektrim, tidak radikal. Itu yang membuat NU menghargai pluralisme. Bukan berarti menggeser prinsip tauhidnya. Tidak. Tapi barangkali pemahaman tauhidnya yang berbeda dengan kelompok tekstual. Misalnya, di dalam memahami Islam, pa-radigma akal dipakai, paradigma wahyu juga dipakai. Bukan hanya tekstual wahyu, sehingga ini sangat re-levan sekali untuk masyarakat yang pluralistik dan dinamis.

Untuk kasus NU sendiri, paradigma mana yang dijadikan PKB sebagai rujukan berbagai tindakan politiknya?

Pertama, dan ini yang terpenting, Ketauhidan. Kedua, keadilan. Ketiga, kedaulatan rakyat. Keempat persaudaraan. Dan kelima moral. Ini yang akan menjadi rujukan atau sekaligus *platform*-nya. Jadi program-program politik, kegiatan politik, ekonomi, hukum semua itu harus merujuk kepadanya. Harus tidak bertentangan dengan ketauhidan -yang diyakini oleh NU adalah Aswaja-, harus tidak bertentangan dengan keadilan yang diperjuangkan oleh Aswaja, harus tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat yang diperjuangkan oleh Aswaja, demikian juga

> Jadi, selama kekuasaan itu kita pahami sebagai alat, tidak ada masalah. Kesalahan Golkar kemarin yang dinyatakan oleh Akbar Tanjung sendiri, kerena kekuasaan itu bukan sebagai alat, tetapi tujuan. ICMI pun akan mengalami hal yang sama kalau kekuasaan menjadi tujuannya. Kalau NU tidak, itu alat. Alat untuk membangun kesejahteraan rakyat

persaudaraan dan moral. Itu yang dijadikan rujukan sehingga nanti perilaku politiknya tercermin di situ semua.

Konsep keadilan Aswaja itu seperti apa? Kedaulatan rakyat Aswaja itu seperti apa? Kedaulatan rakyat misalnya bahwa pemimpin itu harus ber-orientasi kepada rakyat bukan kepada kekuasaan dan jabatan. Persaudaran dalam kontek Aswaja itu seperti apa? Misalnya, *ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah* dan *ukhuwah basyariyah*. Dan moral itu bagaimana? Bagaimanapun perilaku di dalam berbangsa harus dilandasi oleh akhlak yang *karimah*. Oleh karena itu tidak saling menghujat, tidak saling melecehkan, kita hormati hak-hak warga negara, dan sebagainya.

Di dalam pengalaman NU sendiri pembentukan sebuah paradigma itu perlu waktu yang sangat panjang. Salah satu yang dapat membantunya adalah pengalaman empiris. NU sendiri belum punya pengalaman empiris terjun langsung dalam percaturan politik, karena selama ini Orde Baru sangat meminggirkan peran politik NU. Komentar Anda?

Kalau kita melihat dari sisi masa Orde Baru memang iya. Karena sengaja dipinggirkan. Tapi kita harus tahu, kenapa dipinggirkan, karena NU ketika

jaya seperti tahun 1955 sampai 1970 perannya besar sekali dan paling kuat dalam mempertahankan prinsip. Sehingga NU *walk out* dari persidangan, ketika *policy* yang dihasilkannya bertentangan dengan Islam. Jadi dalam hal yang prinsip NU tidak mau mengorbankan. Karena itu dipinggirkan, karena dianggap penghambat Orde Baru.

Jadi, melihatnya jangan hanya pada Orde Baru, tapi dalam kejayaan NU dalam berpolitik, berbangsa dan bernegara, baik di zaman Pak Syaichu, zaman Pak Subhan ZE, zaman Kiai Bisri, zaman Kiai Wahab Hasbullah, maupun di zaman kiyai Wahib, kiai Hasyim Asy'ari dan sebagainya. Jadi melihatnya harus dari sana, karena NU pernah berkiprah dalam politik. Nah, ternyata kelihatan sekali punya prinsip. Karena ketika parpol lain mengesahkan *policy* yang bertentangan dengan Islam, NU *walk out*. Dengan pertimbangan, paling tidak, tidak berdosa di mata Tuhan.

Apakah NU merasa cukup dengan merujuk pada sejarah masa kejayaannya?

Tentu tidak secara mutlak, karena tantangannya berbeda. Terutama sumberdaya manusianya. Tetapi dalam politik, bisa saja kita berkoalisi dengan kelompok yang memiliki *platform* yang sama. Misalnya, NU, yang tidak punya calon presiden, atau calon menteri ekonomi, bisa saja mengangkat golongan lain untuk jadi teman berkoalisi yang *platform*-nya sama. Tidak harus seluruh *platform*, artinya dalam kehidupan berbangsa sama, misalnya yang mempunyai paham pluralisme.

Gagasan-gagasan tentang kedaulatan rakyat, tentang persamaan warga negara di depan hukum, demokratisasi dan lain sebagainya, di kalangan NU merupakan eskperimen yang dimotori oleh Gus Dur yang nota bene di luar panggung kekuasaan. Kemudian persoalannya, bagaimana konsep-konsep itu harus diejahwantahkan dalam prilaku politik ketika merebut dan memegang kekuasaan serta menyelenggarakannya?

Begini, partai mesti berorientasi memegang kekuasaan, tapi tidak boleh menjadi tujuan final. Harus difahami bahwa kekuasaan sebagai alat. Alat untuk apa? Alat untuk melindungi rakyat. Karena kaidah fiqih sudah ada. Selain dikuatkan oleh Gus Dur, dalam fiqih-fiqih di pesantren telah diajarkan bahwa "*tashorruful imam 'alal arra'iyyah manuthun bil maslahah ra'iyyah*. Artinya fikih politik kita harus berorientasi kepada rakyat, kepada persaudaraan, kedaulatan. Sehingga menurut saya, gerakan Gus Dur hanya sebuah penegasan dari ajaran yang selama ini sudah diterima di kalangan santri.

Jadi, selama kekuasaan itu kita pahami sebagai alat, tidak ada masalah. Kesalahan Golkar kemarin yang dinyatakan oleh Akbar Tanjung sendiri, kerena kekuasaan itu bukan sebagai alat, tetapi tujuan. ICMI pun akan mengalami hal yang sama kalau kekuasaan menjadi tujuannya. Kalau NU tidak, itu alat. Alat untuk membangun kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, PKB tetap menempatkan NU sebagai kontrol kepada partai ini. Supaya tidak lengah dari tujuan mendasar ini.

Oleh karena itu saya mengharap kepada orang-orang di PKB, meskipun ingin menjadi anggota legislatif tapi jangan sebagai tujuan, jadikan itu sebagai alat untuk bisa mensejahterahkan rakyat. Selama itu menjadi tujuan, rakyat semakin tidak ter-*openi* (terawat dan diperhatikan). Kalau tidak ter*openi* akan berakibat kehancuran sebuah negara.

Di samping orientasi idiologis apakah ada program-program riil, seperti perbaikan masyarakat yang menjadi bagian penting dalam kemunculan partai-partai Islam ini?

Sampai sekarang masih belum bisa dibaca. Sebab program partai-partai kan belum kelihatan.

Karena NU sangat komitmen terhadap doktrin Sunni, maka dalam praktek politiknya pada masa jaya NU menggunakan pendekatan-pendekatan fikih. Sekarang banyak orang yang menyoroti bahwa paradigma politik Sunni itu masih berorientasi kepada "paradigma kesultanan (kerajaan)", dan belum cukup untuk menjadi paradigma politik yang tantangannya adalah kebangsaan, demokratisasi, kedaulatan rakyat, penerapan hukum, dan sebagainya. Untuk mengatasi hal semacam ini, bagaimana?

Saya kira, kesenjangan itu terjadi karena fikih politik Sunni belum banyak dikuasai. Yang diketahui sangat parsial, belum secara utuh. Oleh karena itu P3M selalu menggalakkan fikih siyasah. Karena wacana politik Sunni belum banyak dipahami, sehingga kesan fikih menjadi kurang menarik. Karena kesan seperti ini lalu orang skeptis melihat masa depan. Tetapi kalau difahami betul saya kira fikih politik Sunni relevan sekali. Seperti antara lain bahwa label tidak penting, yang penting adalah terwujudnya *islamic society*. Untuk masa sekarang itu relevan, dan untuk masa depan juga relevan.

Karena secara faktual historis, memang negara kita, negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku. Dan kalau kita pahami betul, teori politik Sunni mengembangkan politik yang demokratis. Hanya memang sering dimaknai secara *low profil*. Misalnya karena Sunni toleran, maka tidak intens dalam menegakkan keadilan. Maka sebenarnya bukan Sunninya yang salah tetapi pemahamannya yang sa-lah. Karena, *amar ma'ruf* dalam Sunni itu diwajibkan. Sehingga pernyataan NU bahwa bentuk negara kita sudah final, maka yang dimaksud final adalah bentuknya, sedang instrumennya belum. *Amar ma'ruf* inilah yang dipahami secara lemah. Sehingga Gus Dur mengatakan bahwa *amar ma'ruf* adalah rukun Islam.

Jadi hingga sekarang konsep Sunni tentang politik itu masih belum dikembangkan menjadi konsep-konsep politis yang jelas?

Belum. Karena wacananya belum menyentuh itu.

Untuk mengatasi ini?

Wacana harus dikembangkan.

Karena ini merupakan tantangan yang mendesak di mana orang-orang NU sudah terjun langsung dalam arena politik dan kemungkinan besar akan memegang kekuasaan, sementara wacana politiknya belum ada, lalu bagaimana kesenjangan ini?

Saya kira yang pokok begini, yang penting bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* harus dikembangkan dan menurut NU itu wajib. Implikasinya adalah memperjuangkan keadilan, demokratisasi, dan kemajuan.

Menurut prediksi banyak orang untuk masa-masa datang, kekuatan politik yang berbasis massa Islam kemungkinan besar akan ikut serta dalam penyelanggaraan negara. Persoalan klasik yang hingga sekarang belum selesai adalah bagaimana "mengawinkan" antara wawasan keislaman dengan kenyataan pluralisme?

Menurut saya, yang bisa menjembatani adalah Ahlu sunnah wal jamaah. Karena kelenturannya, Aswaja dapat mengawinkan penafsiran terhadap Islam dengan pluralisme. Sedangkan Islam tekstualis itu sangat *rigid* (kaku). Sehingga anjuran penerapan syariah dipahami dengan kaku dan apa adanya.

Menurut prediksi Anda, dalam forum Sidang Umum MPR yang akan datang akan ter-ulang perdebatan tentang ideologi bangsa ini atau tidak?

Tergantung anggota legislatifnya. SU MPR yang akan datang belum dapat kita bayangkan. Namun kemungkinan hal itu akan muncul, tetap ada, karena yang terhitung partai besar ada dua golongan yaitu "Islam nasionalis" dan "Islam tekstualis".

Untuk masa depan Indonesia, yang layak untuk diperjuangkan oleh gerakan politik berbasis Islam apa?

Saya kira semua gerakan politik, tidak terbatas pada partai yang berbasis Islam, perlu mengembangkan sumber daya manusia. Baik dari segi agama, moral maupun wawasan, pengetahuan. Karena sumberdaya yang baik akan membuat sistem yang baik pula.

Bagaimana model gerakan yang pas untuk melakukan perbaikan kultur politik dan lembaga-lemebaga politik agar lebih kondusif untuk pengembangan demokrasi?

Saya kira elit partai harus sama-sama duduk dalam forum simposium atau apa untuk menggagas itu.